

Skripsi

**Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk di Kalurahan
Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DIY**



Oleh:

Orikson Langgu May

18520067

Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata 1

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

**KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENJAMIN
KETERSEDIAAN PUPUK
Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Serjana Jenjang Pendidikan Stara Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2023**



HALAMAN PENGESAHAN

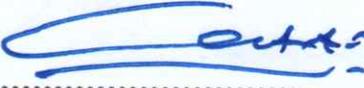
Skripsi ini telah diuji dan dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Mei 2023

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
APMD	
NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Utami Sulistiana, S.P.,M.P</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Drs. Jaka Triwidaryatna, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Orikson Langgu May

Nim : 18520067

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Menyatakan bahwa skripsi “**Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk (Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**” adalah benar-benar hasil kerja dan karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai dengan aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Orikson Langgu May

18520067

MOTTO

Harta Dapat Di Wariskan Kepada Orang Lain,

Namun Tidak Dengan Pengetahuan-mu.

(Orikson Langgu May)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur tak terhingga kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak Daniel Konda Tana dan Mama Mikal Bangu Kahi. Yang telah bersusah payah mendidik, memberikan yang terbaik untuk Saya tanpa pamrih baik itu doa maupun dukungan dengan penuh kesabaran dan senyum diwajah, dan selalu memberi semangat untuk saya dalam keadaan senang maupun susah.
2. Untuk Ibu Utami Sulistiana SP,MP. yang telah memberikan saya banyak petunjuk dan membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk kaka dan adik-adik saya tercinta kak Yubi, kak Hen, adi Leksi, adi Nanda, dan adi Gia yang selalu mendukung dan mendoakan Saya. dan untuk adik-adik saya semoga apa yang telah saya perjuangkan sejauh ini dapat menjadi motivasi bagi kalian dimasa depan. Saya berharap kalian bisa jauh lebih baik dari saya.
4. Untuk orang yang selalu menjadi penyemangat saya selama di Yogyakarta, dalam kondisi apapun Ayung Wildan Pratiwi, Thanks for everything.
5. Untuk teman-teman dan keluarga saya Umbu Andra,Umbu Tanda, Monang, Nando, Arto Lapu, Olus kasa, dan Sepri Wanula, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada kalian dan semoga kalian sukses.
6. Teruntuk almamater kampus terbaik STPMD “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi dengan judul KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN PUPUK (Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul). Saya menyadari bahwa pembuatan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik melalui doa, bimbingan, saran dan sebagainya. Untuk itu pada kesempatan ini saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi saya dalam menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M,Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Drs. Jaka Triwidaryatna, M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dalam skripsi ini.
6. Ibu Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan pada skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mendidik saya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan.
8. Pemerintahan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya membutuhkan kritik dan saran yang

membangun dari para pembaca. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kita semua.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Peneliti

Orikson Langgu May

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pedukuhan di Kalurahan Tileng.....	39
Tabel 2. Penggunaan Lahan di Kalurahan Tileng.....	40
Tabel 3. Usia Penduduk dan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	43
Tabel 6. Produk Pertanian dan Peternakan.....	49
Tabel 7. Nama-Nama Kelompok, Jumlah Anggota dan Alamat.....	50
Tabel 8. Lembaga Pemerintahan.....	52
Tabel 9. Lembaga Kemasyarakatan.....	53

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa.....	55
Bagan 2. Susunan Organisasi Kalurahan Tileng.....	56

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGSAHAN.....	ii
HALAMAN PERYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Literatur Review.....	7
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Fokus Penelitian.....	28
H. Metode Penelitian.....	28

BAB II PROFIL KALURAHAN TILENG.....	35
A. Sejarah Kalurahan Tileng.....	35
B. Geografis.....	38
C. Demografis.....	40
D. Budaya.....	44
E. Potensi Ekonomi.....	46
F. Pertanian.....	48
G. Pemerintahan.....	51
BAB III ANALISIS DATA.....	57
A. Deskripsi Imforman.....	57
B. Pembahasan.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR FUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	94

INTISARI

Sektor pertanian memiliki peranan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat petani di Kalurahan Tileng, sehingga Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk merupakan salah satu bentuk peranan pemerintah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk petani, dalam hal ini masyarakat petani sangat membutuhkan kehadiran Pemerintah Kalurahan dalam menyelesaikan persoalan kekurangan pupuk subsidi. Kalurahan Tileng memiliki penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian, kekurangan pupuk merupakan persoalan yang mereka alami sehingga petani di Kalurahan Tileng membutuhkan adanya kapasitas dari pemerintah Kalurahan untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk, dan bagaimana Faktor-faktor yang Menghambat Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk bagi Petani. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk. Fokus penelitian yang pertama yaitu pemetaan kebutuhan tani dalam menyediakan subsidi pupuk, kedua mekanisme pembagian pupuk bagi petani dalam meningkatkan kualitas pertanian, ketiga faktor-faktor pendukung dalam penguatan subsidi pupuk bagi masyarakat tani, dan yang keempat faktor-faktor penghambat dalam penguatan subsidi pupuk bagi petani.

Dalam melakukan penelitian dilapangan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif, serta Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara masalah, dan dokumentasi. Objek penelitian yaitu Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, DIY. Subjek penelitian yakni pemilik informasi yang dibutuhkan penelitian adalah yang menjadi informan penelitian yaitu orang-orang pilihan yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti yaitu pemerintah Kalurahan Lurah, Carik, Dukuh, Ketua Gapoktan, dan masyarakat Kalurahan Tileng (Petani) yang berjumlah 10 orang narasumber.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan Pemerintah Kalurahan dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. Pemerintah Kalurahan Tileng lebih mengarahkan para petani menggunakan pupuk kandang yang sudah di olah menjadi pupuk kompos. Untuk pupuk bersubsidi Pemerintah Kalurahan Tileng belum ada tindakan. Dalam hasil penelitian untuk tahun ini Pemerintah Kalurahan Tileng akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Gapoktan untuk menyusun RDKK (Surat Definitif Kebutuhan Kelompok) sehingga setiap kelompok yang ada di Kalurahan Tileng bisa memiliki RDKK. Kesimpulan dari Kapasitas Pemerintah Kalurahan Tileng menegaskan kepada petani untuk tetap memakai pupuk organik supaya tetap menjaga kesuburan tanah secara alami dan untuk pupuk kimia Pemerintah Kalurahan Tileng mengurangi karena dalam pengguna pupuk kimia yang secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan unsur hara yang ada dalam tanah. Saran yaitu Guna meningkatkan Kapasitas Pemerintah Kalurahan Tileng kepada petani maka perlu adanya pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan Pemerintah Kalurahan bekerjasama dalam hal meningkatkan Kapasitas alokasi pupuk untuk petani maka perlu adanya forum pelatihan bagi petani.

Kata kunci: Kapasitas, Pemerintah Desa, dan Petani

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Petani merupakan faktor produksi manusia pertanian, sekarang petani ini tinggal mempunyai berbagai keterbatasan yang berujung bagi rendahnya kualitas pertanian. Menimbulkan upaya tani di Indonesia masih dikuasai oleh usaha tani perbandingan kecil yang sangat lemah dalam berbagai bidang. Petani kecil sangat bergantung pada pola cuaca, irigasi, pupuk, pembenihan, dan sarana produksi pertanian lainnya. Selain itu pada umumnya petani tidak memiliki modal biaya yang cukup untuk menambah produksinya.

Dalam kewenangan wilayah untuk mengatur dan mengurus keperluan masyarakatnya, amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka salah satu bagian bahwa perlu maju merupakan wilayah pedesaan, dan menaikkan tingkat baiknya pertanian. Pemerintah desa sebagai seseorang yang mampu memberikan bimbingan dan arahan pada sekelompok untuk mencapai hasil yang baik dalam memegang peranan dalam menjalankan pembangunan di desa, menurut undang-undang desa, oleh sebab itu desa memiliki otonomi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, antara lain ketentuan harus dengan ketentuan perundang-undangan sebagai perangkat hukum yang melindungi jalannya pemerintahan desa. Hal ini penting karena berguna untuk menambah sumber daya manusia (SDM) petani, dengan merubah prilaku masyarakat tani melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki.

Pupuk yaitu sebagai sarana produksi penting yang menunjang produktivitas gabah petani. Kekurangan penggunaan pupuk mengakibatkan produksi gabah petani menurun. Dengan demikian kebutuhan akan pupuk adalah salah satu hal yang utama

bagi petani dalam meningkatkan produksi gabah mereka. Di sisi lain dengan harga jual sesuai kemampuan petani, sulit bagi produsen pupuk untuk menjaga kelangsungan usaha dan kemampuannya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pupuk nasional. Pemerintah perlu menyediakan subsidi pupuk, agar kedua tujuan tersebut bisa berjalan. Dalam hal ini, program pupuk bersubsidi mengacu pada penggunaan pupuk yang efektif, yakni pemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Tujuan kebijakan pemberian subsidi pupuk ini adalah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usahatannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan menunjukkan bahwa alokasi pupuk subsidi masih belum bisa menutupi kebutuhan pupuk yang diminta oleh petani karena berbagai hal dalam proses dan penyalurannya serta oleh pihak yang terkait.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sasaran pertanian, antara lain subsidi pupuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk yang telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang dimaksudkan membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usahatannya agar dapat menerapkan pemupukan berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal. Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran produksi pertanian agar terus meningkat yaitu dengan melaksanakan fungsinya melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani. Pada Undang – Undang tersebut, usaha pemerintah dalam melindungi petani melalui upaya dalam menyediakan sarana produksi salah satunya pupuk.

Pemerintah menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani yang kegiatannya memfasilitasi petani untuk memperoleh sarana produksi pertanian yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Esensi dari kebijakan subsidi pupuk yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Adapun sejak saat itu subsidi pupuk diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET) subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan harga HET untuk petani yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan penerimaan pupuk bersubsidi dalam pemertaan ini yaitu petani harus bergabung dengan kelompok tani di desa atau wilayah setempat dan juga petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 15 tahun 2013 mengatur tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian. Meskipun pemerintah telah banyak mengalokasikan anggaran untuk penyediaan pupuk bersubsidi disertai dengan berbagai kebijakan terkait alokasi dan distribusi serta penyalurannya kepada petani, tetapi berkaitan dengan jumlah pupuk bersubsidi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Ini disebabkan adanya ketidak tepatan dalam pengadaan pupuk subsidi yang berawal dari penentuan jumlah atau alokasi kebutuhan pupuk subsidi. Selain itu, ada masa dimana petani telah membutuhkan pupuk bersubsidi tersebut untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pertaniannya, namun pupuk bersubsidi tersebut belum tersedia sehingga petani beralih ke pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan bertaniannya yang tentu saja dengan harga yang relative lebih tinggi. Hal itu dipicu oleh adanya ketidak beresan dalam penyaluran atau

pendistribusian pupuk bersubsidi yang tentu saja merujuk pada proses pengawasan dalam penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi.

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan tumbuhan dan produktivitas pertanian. Pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek Teknik, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), besar subsidi sehingga system distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. Namun kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik, masih sering terjadi berbagai kasus antara kelangkaan pupuk yang menyebabkan harga actual melebihi HET dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat, pengawasan yang belum maksimal, disparitas harga pupuk bersubsidi dan non subsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran.

Kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi ke luar petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang penyediaan dan distribusi mendapat subsidi dari pemerintah untuk kepentingan petani yang dilaksanakan atas dasar rencana pemerintah di sektor pertanian. Bentuk pupuk bersubsidi yaitu pupuk anorganik (urea, superphos, ZA, NPK) dan pupuk organik. Pupuk bersubsidi ditetapkan menjadi barang dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2005. Lingkup pencegahan mencakup pengadaan dan penyaluran termasuk jenis, banyak mutu, wilayah tanggung jawab, harga eceran tertinggi (HET) dan waktu pengadaan dan penyaluran. Kebijakan subsidi pupuk kepada petani sasaran

meliputi petani tanaman pangan dan hortikultural, pekebun rakyat, petenak atau penanam hijauan.

Pupuk mewujudkan dari bagian istimewa serta pendekatan yang merupakan bagian penting untuk meningkatkan dalam penghasilan disektor pertanian, kapasitas dalam upaya petani untuk menghasilkan pendapatan dari tanaman yang dapat membangun ketahanan lumbung padi. Mendasarnya peran pemerintah dalam penggunaan pupuk sehingga terus menimbulkan peningkatan melalui pendekatan yang secara baik dalam penggunaan pupuk, jasa pemerintah sekalipun penyaluran bantuan yang bersubsidi atau non subsidi. Sehingga sependapat melalui dorongan dari berkembang zaman sehingga memunculkan pendekatan yang tercatat dalam menjalani perubahan terus memajukan efisien penggunaan system penyaluran hasil produksi melalui pupuk demi menjaga kualitas. Untuk menambahkan rasa semangat petani dalam penggunaan pupuk secara berimbang di tingkat petani, yang harus dilakukan ialah instrument prosedur yang dilewati oleh penguasa adalah memberikan bantuan harga pupuk sesuai kemampuan petani. Hadirnya bantuan subsidi pupuk maka akan menguragi harga pembelian dipasaran, jadi akan dampak dalam pengurangan pembelian dipasaran akan terus menurun dengan adanya bantuan pupuk kepada perolehan pertanian akan menjadi terus meningkat jika diperbandingkan dengan tanpa bantuan dari pemerintah. Dengan adanya pengurangan harga ini berikutnya dapat menumbuhkan rasa semangat petani untuk menggunakan pupuk dimana produktivitasnya atau keuntungan akan memperoleh hasil yang maksimum. Melalui insentif itu pula produsen pertanian akan terdorong untuk mempergunakan teknologi produksi yang lebih patut. Bantuan subsidi terhadap petani yakni salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dikerjakan pemerintah dengan lingkup dan kuantitas yang berubah dari waktu ke waktu.

Cara penyaluran pupuk bersubsidi telah beberapa kali menjalani perubahan, antara lain dengan percobaan bentuk kartu kendali dan uji coba bentuk subsidi pupuk kemudian ke petani. Subsidi pupuk diberikan agar pupuk yang diperlukan oleh petani terbuka dengan harga murah dan tercapai, sehingga dapat menekan biaya produksi dan menumbuhkan produktivitas upaya pertanian. Pembagian pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran terjadi berulang kali setiap tahun. Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu penyusunan RDKK belum sesuai dengan ketentuan, masih adanya ketimpangan harga antara pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi, penetapan margin penyalur tidak realistis, rencana pemerintah buat subsidi semakin terbatas, control, dan dukungan pemerintah kurang sempurna. Dalam kaitan beserta kelangkaan pupuk ditingkat petani ialah konsekuensi logis dari lemahnya bentuk penyaluran khususnya terkait aspek penyediaan pupuk.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari masalah pada latar belakang yang sudah diuraikan maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang Menghambat Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk bagi petani?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademik

Secara akademik Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru ataupun wawasan yang berguna untuk kepentingan umum dan menjadi referensi kebutuhan akademik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini mampu digunakan sebagai kajian ilmiah yang menyangkut melalui Studi Ilmu Pemerintahan terkhususnya di bidang pertanian.
- b. Bagi Pemerintah, menjadi bahan petunjuk bagi Pemerintah Desa Tileng untuk meningkatkan kualitas pertanian.

E. LITERATUR REVIEW

Sri Nugroho Volume 3 No. 1 juni 2018 ISSN: 2528-276X ISSN: 2598-6465
Jurnal Governance. Berjudul Mempertimbangkan Pentingnya Konsolidasi Keorganisasian Pemerintahan Desa. Desa merupakan daerah otonomi dan sudah ada setelah Negara terwujud. Ini disebabkan desa memiliki komunitas yang terbentuk

didalam Desa yang mempunyai berpemerintahan sendiri, yang mempunyai kuasa untuk menata dan menangani dirinya sebagai organisasi terbawah di sesuatu Negara. Maknanya desa telah terbentuknya wujud kemasyarakatan yang berpolitik tersendiri. Namun lembaga yang memiliki peran diorganisasi Desa yang telah terbentuk namun terpinggirkan karena penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Konsekuensinya adalah hilangnya ruang penguasa yang dapat mengatur Desa sebagai daerah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa. Karena mengambil manfaat karakter pengamatan kualitatif, penelitian yang membuktikan bahwa makna paling mendasar pematapan organisasi pemerintahan desa pasca keadaan peraturan desa. Hasil dari penelitian menunjukkan transparansi (keterbukaan) ruang yang dimiliki oleh pemerintah desa yang mengutamakan pembangunan ekonomi, sementara penguatan kelembagaan kekuasaan desa masih terpinggirkan.

Hikmahanto Juwana. Volume 4 No 2 Agustus 2018, ISSN: 2407-4276 ISSN: 2356-4164, Jurnal Komunikasi Hukum. Berjudul Prespektif Praktek Program Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyelesaian Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan di Indonesia. Menjelaskan terdapat alokasi subsidi bidang pertanian yang terdiri atas subsidi pupuk. Dalam kebijakan perpupukan Indonesia, penjagaan masih rentan terhadap persoalan di lapangan, mulai dari definisi petani yang tidak jelas, penyaluran pupuk bersubsidi seringkali mengesampingkan alokasinya, implementasi kebijakan subsidi pupuk masih menemui kendala dan permasalahan pada aspek pendataan, aspek penggaran, serta aspek penjagaan yang belum dijalankan manfaatnya secara sempurna.

Nurliana. Volume. 1 No. 1 Januari 2022 e_ISSN: 2809-9850. Jurnal Ilmiah Inovasi dan Komunikasi Pembangunan Pertanian. Berjudul Dinamika Penyediaan Pupuk Subsidi Pada Usaha Tani Padi Sawah Melalui Mekanisme Rencana Definitif

Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) di Kota Kendari. Menjelaskan bahwa proses penyediaan pupuk sudah sesuai dengan alur penyediaan pupuk bersubsidi sesuai peraturan pemerintah, namun dalam penyusunan RDKK untuk mengusulkan besarnya subsidi pupuk di labibia masih dibantu oleh penyuluh, sedangkan di kelurahan Baruga dilakukan oleh ketua kelompok tani. Pemerintah tidak selalu sepenuhnya memenuhi pupuk bersubsidi karena terbatasnya anggaran dan alokasi kuota pupuk bersubsidi.

Syolhan Abdi. Volume. 3 No. 5 mei 2021 e-ISSN: 2747-1578 p-ISSN: 2747-1659 Jurnal Administrasi. Judul Implementasi Metode Penjelasan Pembagian Pupuk Bersubsidi pada PT. Pertanian Up Kerinci. Bidang pertanian adalah yang memiliki peran yang paling penting dalam pembangunan ekonomi maupun nasional, dalam penyediaan pupuk bersubsidi oleh Pt. Up Kerinci Farming melakukan tiga aspek distribusi, yaitu aspek cara yang meliputi peningkatan penggunaan pupuk dan peningkatan efisiensi penggunaan pupuk anorganik. Aspek pengelolaan sosialisasi sistem distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup kepada seluruh pemangku kepentingan antara lain aparat pemerintah pusat dan daerah, tokoh masyarakat dan petani. Pilot projeck pendistribusian pupuk bersubsidi menggunakan kartu kendali (smart card) perlu terus dikaji efektifitas pelaksanaannya, kordinasi litas sektor, pusat dan daerah untuk menjamin efektifitas pupuk bersubsidi distribusi dan pelaksanaan pemupukan, dan reposisi kios distribusi pupuk dengan lebih meningkatkan peran pemerintah dalam mengatur penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Siti Hamidah. Volume 8 No 10 juni 2022 ISSN: 2622-8327 ISSN: 2089-5364 Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Berjudul Pelayanan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang. Menjelaskan pupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya mempunyai posisi yang strategis. Dalam mencapai ketahanan pangan

pemerintah wajib menjamin ketersediaan kebutuhan pertanian seperti pupuk. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk telah lama dilaksanakan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya, seperti kebijakan pengadaan pupuk, penyaluran pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam upaya implementasi kebijakan yang optimal, perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan pupuk bersubsidi yang ada, dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan yang ada berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama petani.

Cakra Putra Volume 13 No 2 Agustus 2019 e-ISSN: 2615-6628 p-ISSN: 1411-7176, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian. Berjudul Optimalisasi Kinerja Sistem Distribusi Pupuk Bantuan Pemerintah di Provinsi NTB. Menjelaskan pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk. Penyediaan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meringankan beban petani serta menjamin ketersediaan pupuk dalam hal ini urea, ZA, NPK, SP36, dan organik sesuai dengan permentan no 47 /permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. Agar penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tepat sasaran, maka dibutuhkan kajian mengenai komitmen dan dukungan pengawalan serta pengawasan dari seluruh pihak berkepentingan, khususnya pemerintah.

Sugiono volume 5 No 1 Juli 2022 P-ISSN: 2656-2871 E-ISSN: 2656-4351 Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah. Berjudul Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis. Menjelaskan pupuk bersubsidi adalah pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah. Pupuk bersubsidi digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani dan petani di sektor pertanian yang diatur melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK adalah perhitungan rencana

kebutuhan pupuk bersubsidi yang di susun oleh kelompok tani berdasarkan penggunaan pupuk yang lebih tinggi atau lebih kecil dari anjuran untuk mengurangi efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada dasarnya pupuk bersubsidi berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun permasalahan mendasar yang sebenarnya terjadi adalah penyaluran pupuk bersubsidi cenderung lebih rendah dibandingkan penyaluran pupuk nonsubsidi.

Anicetus Wihardjaka, Volume 30 No 1 Mei 2021 p-ISSN:0852-0607 e-ISSN: 2527-6239, Jurnal Pangan. Berjudul Dukungan Pupuk Organik Untuk Memperbaiki Kualitas Tanah Pada Pengelolaan Padi Sawah Ramah Lingkungan. Pupuk organik mempunyai peranan penting dalam penyusunan pertanian tanaman pangan selaku sistematis, seiring dengan strategis prioritas pengutamakan produksi dan produktivitas komoditas pangan. Pemakaian pupuk kandang, dan pupuk kompos dalam rancangan pemupukan berimbang berkarakter multifungsi, antara lain memindahkan hara esensial, membenahi daya produksi dan mutu tanah pada lahan yang selalu dibagikan pupuk anorganik, mempertinggi persediaan karbon, serta memindahkan pengaruh pertukaran iklim. anjuran penerapan penggunaan pupuk kompos di komunitas pertanian harus disebarkan serta sekaligus dilakukan pemeriksaan mutu agar dapat membatasi masalah terhadap lingkungan.

Endro Gunawan. Volume 28, No 2, Desember 2020 ISSN: 0854-526X. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Berjudul Program Persepsi Petani dan Permasalahan Kartu Tani Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. Menjelaskan program kartu tani telah dicadangkan sejak tahun 2016 di wilayah jawa, namun implementasinya hingga saat ini belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor kuat dan lemahnya persepsi petani terhadap program ini. faktor persepsi petani yang kuat tentang kepastian memperoleh pupuk bersubsidi

serta kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi serta menggunakan kartu tani. Namun faktor persepsi petani juga kuat bahwa program kartu tani kurang tersosialisasi dengan baik dan kesulitan menggunakan kartu. Urusan utama dalam penerapan kartu tani merupakan kurangnya kesadaran petani bagi yang menggunakannya, kerumitan bagi penggunaan kartu, penggunaan kartu ini bukan diwajibkan bagi pemerintah daerah.

Nilai Wijayanti. Volume 4, no 2, Desember 2021, p-ISSN: 2621-3222, e-ISSN: 2621-301X, Jurnal Teknologi dan Lingkungan. Berjudul Evaluasi Sistem Distribusi Pupuk Dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilitas Harga di Tingkat Petani. Menjelaskan pupuk merupakan sarana produksi yang berperan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dikecamatan utan dan plampang sudah sesuai dengan aturan dari permentan dan permendang, implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari segi ketepatan tempat, ketepatan jumlah, ketepatan harga, ketepatan jenis, dan ketepatan waktu masih memerlukan perbaikan, pelaksanaan penyaluran secara keseluruhan masih lemah, perlu ditingkatkan lagi kinerjanya.

Penelitian ini memiliki kekhususan di bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini untuk mengetahui Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk. Pupuk merupakan salah satu yang sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, jika petani mengalami kekurangan pupuk akan mengakibatkan pendapatan petani menurun. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kalurahan Tileng mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menegaskan kepada petani untuk menggunakan pupuk organik, dengan alasan dalam menggunakan pupuk kimia yang berlebihan akan mengakibatkan merusak unsur hara yang ada dalam tanah, jika menggunakan pupuk organik akan menjaga kesuburan tanah

secara alamiah. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Tileng untuk mencukupi kebutuhan pupuk untuk petani yaitu mengadakan sekolah lapang yang artinya pemerintah mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik sekaligus praktek langsung dilapangan, ini merupakan Kapasitas yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Tileng untuk mencukupi kebutuhan pupuk bagi petani.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Desa

Desa merupakan organisasi kecil yang dibawah naungannya kecamatan dan yang memiliki jiwa sosial tinggi dibandingkan di kota, atau biasa disebut daerah kedadatan maupun daerah kampung halaman. Pandangan terhadap Kalurahan atau biasa disebut dengan nama lain itu sendiri yaitu memiliki pemusatan penduduk yang sebagian besar memiliki pekerjaan di bidang pertanian serta tempat yang jauh dari kota. Sutarjo Kartohadikusumo mengartikan Kalurahan menjadi sebagai persatuan peraturan Kawasan yang menduduki oleh komunitas dan serta memiliki berwenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri, memiliki tradisi dan budaya yang istimewa serta dengan prinsip khas pada organisasi yang dapat mengatur penduduknya serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Desa merupakan Desa dan desa adat yang memiliki gaya hidup saling melengkapi satu sama lain dan bermata pencaharian sebagai petani, juga mempunyai persatuan komunitas yang mempunyai aturan serta mempunyai garis wilayah serta memiliki wewenang demi menata serta menangani kegiatan pemerintahan. Desa hadir dengan semangat kegotongroyongan, musyawarah mufakat, dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan.

Desa dimaknai berdasarkan tindakan penduduk dengan mencermati keberadaan Kalurahan atau biasa disebut nama lain serta keadaan penduduk setempat dengan tradisi

adat-istiadat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian Desa yang berdekatan, atau pembagian Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pengaturan Desa di luar Desa yang telah ada dan biasanya disebut pemerintahan Desa. Desa ialah persatuan komunitas adat serta melingkupi garis pemisah antara dua atau lebih wilayah yang berkemampuan dapat menyusun ataupun mengusahakan kegiatan penguasa khususnya di area Kalurahan, keinginan penduduk yang menjadi ide penduduk. suatu kondisi otonomi daerah, salah satu dari bagian yang perlu dikembangkan yaitu wilayah pedesaan. Tercatat yaitu peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa. Dibagikan waktu kepada masyarakat desa untuk menyusun dan mengurus rumah tangganya sendiri, melalui kapasitas yang berlaku yakni melalui mencermati prinsip-prinsip demokrasi, karakter serta masyarakat, pemerataan kelayakan sesuai hak, serta mengamati potensi dan keanekaragaman.

Desa dapat dikatakan suatu wilayah yang berada diluar kota. Apabila kita cermati suatu Desa ternyata tidak sederhana itu, karena dalam suatu Desa terdapat beberapa aspek yang saling memengaruhi seperti sumberdaya alam, sumber daya manusia dan kearifan lokal dalam masyarakat Desa. Desa ditempatkan sebagai entitas diam pada ruang dan waktu yang dalam kediamannya tersimpan sebagai aspek. Sebagai statika terbentang dalam aspek hukum dan administrasi, geografis, ekonomi, budaya, dan aspek ekologi. Sebagai dinamika, desa tempatkan sebagai entitas bergerak melintasi waktu, yang dalam pergerakannya berlangsung sejumlah proses, sebagai dinamika, desa berproses dari ciri pra desa, desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada. Desa berubah menjadi dekat dengan ciri sebagai kota. Serta banyak bergantung pada alam.

Desa sebagai tempat hidup dan sumber kehidupan bagi masyarakat yang selama ini tampak dilihat dan diperhatiakn sebela mata, maka pembangunan desa yang suda

dilakukan blum merata. Desa harus mampu menjadikan model sebagai agen untuk mendemostrasikan kehidupan demokrasi, dimana seluruh komponen masyarakat secara nyata dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya. Meningkatkan kapasitas kualitas sumber daya manusianya seluruh perangkat desa agar desa memiliki manajerial dan substansial yang berkait dengan aspek-aspek pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Desa memiliki potensi modal sosial yang besar yaitu nilai gotong-royong, dan nilai sosial yang nilai-nilai ini sekarang mulai terkikis oleh pembangunan dan nilai-nilai itu tidak boleh terkikis oleh neo kapitalisme yang dibawah oleh arus globalisasi, peran desa sangat menantang karena memiliki peran ganda yaitu menjadi kepajagan tangan pemerintah dan menjadi wadah aspirasi warganya sehingga seluruh warganya merasakan memiliki terhadap hasil pembangunan.

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti kampung halaman atau tempat lahir. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Binarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpenduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpenduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsul fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah.

Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan Bertani atau bercocok tanam.

Paul H. Ladis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yaitu mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan, dan cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah diterangkan sebagai sekelompok orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan bentuk pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka berkerja. Penguasa dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan ketenteraman rakyatnya dan kepentingan Negara, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, mempersoalkan juga melingkupi tugas-tugas lainnya. Pemerintah Desa yakni suatu prosedur pemanduan upaya masyarakat desa adapun berhubungan melalui upaya pemerintah buat mempertinggi kualitas hidup masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 berhubungan dengan Desa Pasal 23, di nyatakan bahwasanya Pemerintah Desa diadakan pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 pembuatan bahwasannya pemerintah Desa ialah Kepala Desa maupun bahwa yaitu melalui nama lain didukung

perangkat desa menjadi unsur pengurusan pemerintahan desa. muncul pemerintahan desa yang melahirkan organisasi pengurusan aparat desa.

Pemerintah desa terjadi karena berdasarkan kepala desa dan himpunan desa. Selama, himpunan desa berlaku untuk sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Adapun dimaksud dengan “perangkat desa lain” suatu persatuan ini yang terlibat perlengkapan pendamping kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, penerapan menurut bidang sebagaimana kepala urusan, dan bagian kedaerahan ibarat hulu dusun maupun sebutan lain. Pemerintahan benar-benar diperlukan sebagai pengurus rakyat, menjamin rakyat, serta mencukupi kebutuhan rakyat karena dasar Negara memiliki tindakan memaksa, penguasaan, dan meliputi keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat pemantauan dan diawasi serta mampu mengatur dengan mudah. Setiap wilayah mempunyai penguasa dan perangkat pemerintahannya masing-masing berangkat dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa serta lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Kalurahan yang menyusun serta memeriksa keperluan penduduk setempat menurut sejarah dengan tradisi lokal bahwa dilegalkan dan dimuliakan dalam bentuk pemerintahan Nusantara.

Pejabat penguasa Kalurahan atau yang disebut nama lain yang bekerja sebagai pelaksanaan Pemerintah Kalurahan, membuat penyusunan, penegakan penduduk serta memandirikan penduduk. Menyelenggrakan pemerintah Kalurahan seperti tata praja pemerintahan, melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lain. Sekrataris desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin sekretariat desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, seperti melaksanakan urusan perencanaan

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melaksanakan urusan keuangan pengurusan administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran. Kepala urusan berperan sebagai kepala urusan bertugas untuk mendukung juru tulis kalurahan seperti kegiatan bantuan tata laksana pembantu penerapan kewajiban pengurus sebagaimana tata laksana surat menyurat, serta kepala urusan perencanaan memiliki fungsi sebagai mengoordinasikan urusan perencanaan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR. Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Pemerintah adalah fungsi dalam melaksanakan ministrasi, pemerintahan yang meliputi tugas dan pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Pemerintah desa adalah yang mengatur semua urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat dalam teknik pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam peraturan masyarakat Desa/Kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas Sekretaris Desa dan perangkat lain.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Pemerintah merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Pemberian pelayanan kepada masyarakat juga hasil kerja yang nyata dalam pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Dengan demikian dibutuhkan tata kelola yang baik dan benar sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab tak terlepas dari optimalnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah desa dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik dan melaksanakan program-program yang dapat mendukung kinerja aparatur desa.

Penguasa desa mempunyai urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintah, serupa dengan urusan tata pemerintahan, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan menyelesaikan lingkungan. Sehingga wujud organisasi pemerintah desa paling tidak harus mewakili urusan yang dimiliki pemerintah desa. Era reformasi telah membawa banyak perubahan system pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di tingkat desa. Perubahan system pemerintan desa ditandai dengan adanya otonomi. Kalurahan menjadi pengurusan pejabat terkecil yaitu tumpuan yang bagus untuk bantuan sekalipun pembentukan. Penyelenggara pemerintah Kalurahan diselenggarakan oleh Lurah berserta pamong serta parlemen desa (BPD). Hubungan yang baik dan kondusif antara pemerintah desa dan parlemen desa diharapkan mampu memperlancarkan penyelenggaraan otonomi desa yang mampu mendorong good governance yang mampu mendekatkan negara dengan masyarakat desa sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan desa yang lebih transparan.

Good governance adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. mengemukakan good governance adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan yang diambil secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara umum good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.

3. Petani

Orang yang bermata pencaharian dibidang pertanian dapat ditafsirkan menjadi pekerjaan adapun dilangsungkan demi penggunaan potensi bahwa dilangsungkan oleh penduduk menjadi pengolah serta pengguna pendapatan adapun perlu mendapatkan bentuk keuntungan dari bibit pangan, barang mentah akan diproses, sumber energi, dan pengolahan wilayah tempat untuk memenuhi hidupnya dengan memanfaatkan perlengkapan yang bersifat tradisi lama (tradisional) maupun yang baru. Pandangan bertambah melimpah petani mencangkup segenap upaya serta dilangsungkan menambahkan pemanfaat makhluk hidup yang tergolong tanaman, dan hewan serta dikelola dan mengambil manfaatnya untuk keperluan manusia. Sementara dengan wajar pekebun ditafsirkan sebagai kesibukan maupun perbuatan saat dilangsungkan dalam penggunaan tanah garapan bahwa bermaksud buat mengembangbiakkan macam jenis tumbuhan tertentu, adapun terpenting bahwa berkarakter tahunan dan yang dapat dikonsumsi oleh manusia.

Disuatu kehidupan manusia banyak sekali mata pencaharian bahwa digemari serta membuat dasar tumbuh bukan dikhususkan pekerjaan menjadi pekebun. Seperti pembajak bersarkan Arthur Mosher yaitu orang tani yang berprofesi sebagai pemelihara

tumbuhan atau berbagai makhluk hidup untuk diambil keuntungannya memperoleh penghasilan yang memuaskan. Pengertian pekebun berdasarkan bagian dari agrobisnis di Negara kesatuan merupakan suatu penyelenggara penting usaha niaga tani. Petani menjadi bentuk perseorangan yang memiliki kepribadian tersendiri secara individu yang dapat diamati dari perbuatan yang kelihatan dalam melakukan kegiatan usaha tani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa petani adalah penduduk Negara Indonesia yang individual dan atau bersama keluarganya yang melaksanakan usaha tani dibagian tanaman pangan, budidaya tanaman kebun, perkebunan dan atau peternakan.

Petani merupakan warga masyarakat adapun mempunyai mata penghidupan pokok di bagian pertanian. Didalam kebiasaannya sehari-hari, orang tani rata-rata berjiwa rangkap. Dengan satu pihak, komunitas orang tani pada biasanya berpemukiman antara kawasan perkampungan yang memiliki sumber daya alam yang padat. Mereka sangat serius dalam mengelola pertanian di desanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam. Mereka dipengaruhi untuk pertumbuhan ekonomi pasar dan selaku kedudukan, objek politik dari bagian penguasa/pemerintah dan bagian luar, masyarakat luar. Menurut sejarah, kesibukan petani dan sistem pertanian di Indonesia ini, tidak terlepas dari cengkeraman ekonomi pasar secara nasional maupun mendunia dan perubahan politik saat yang sudah berlalu. Sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencangkup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi Indonesia, nilai fungsi pertanian tersebut perlu dipertimbangkan dalam penepatan kebijakan struktur insentif sektor pertanian. Pembangunan lahan pertanian akan

dilaksanakan jika sektor pertanian dengan nilai multifungsinya dapat membagikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Petani adalah seseorang yang pekerjaan utamanya bertani untuk konsumsi diri sendiri atau keluarganya. memisahkan dengan kedudukan bahwa begitu ada semacam tradisional pada bagian orang tani sebagaimana, orang petani tanah sedikit, orang petani yang kontrak serta tenaga yang bercocok tanam. bahwasanya kedudukan itu bukan berkarakter istimewa, dengan bonus bahwa dikontrak. Semacam itu saja kelihatan tenaga kerja bahwa mempunyai tanah pribadi. menjadi sebaiknya tersedia bertumpukan keadaan penghasilan, karena kesempatan bahwa orang tani kurang tanah serta serba kekurangan dari tenaga kerja yang bermata pencaharian sebagai berladang bilamana benar pasaran bahwa menguntungkan dari pegawai. Pada penjelasan agraria biasa orang tani dengan mempunyai makna merupakan manusia bahwa melakukan upaya bercocok tanam melalui tindakan upaya pekerjaan perkebunan menjadi pekerjaan utama.

Perilaku petani merupakan hal-hal yang mendasari petani untuk membuat kesimpulan. Petani dicerminkan dalam tindakan sehari-hari baik dalam lingkungan seperti keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan. Ini dapat mempengaruhi cara berpikir petani dalam pengelolaan usahatani yang dilakukan sejak dahulu kala. Pengelolaan usahatani yang sudah dilakukan sejak dulu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan sehari-hari. Petani merasa membutuhkan dukungan atau sebagai motivasi yang ada didalam perorangan. Selepas mendapatkan dorongan itu tampak oleh sebab itu petani berjuang untuk memenuhi penyusunan usaha tani dengan terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan, dimana tradisi inilah yang membangkitkan perilaku petani.

Petani Indonesia berusaha meningkatkan produksi pertanian agar dapat memenuhi bagi hidupnya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Selain motivasi, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perilaku petani. Salah satunya cara berpikir, cara berpikir petani sudah diturunkan dari generasi tua ke generasi muda, dimana secara tidak langsung akan tercipta model perilaku yang berorientasi pada sistem nilai dan diikuti dengan patuh untuk jangka waktu lama, meskipun situasi yang menjadi dasar sudah lama berubah. Oleh karena itu petani banyak belajar dari pengalamannya sendiri maupun pengalaman orang lain tentang suatu inovasi teknologi dengan mencoba serangkain tindakan yang beragam. Seorang petani dengan Pendidikan yang rendah seringkali bersifat apatis terhadap inovasi sebagai akibat kegagalan yang dialaminya pada masa lampau, karena kurangnya pengetahuan.

Berdasarkan Sukino (2013:8), Petani merupakan seseorang yang beranjak dibidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain sebagainya. Dengan keinginan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri maupun menjualnya kepada orang lain. Peranan pekebun yaitu sebagai pemimpin atau pengelola usaha tani. Dalam kewajiban ini banyak diutamakan kemampuan merupakan suatu mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Ketetapan yang dipetik oleh petani selaku pengurus, antara lain memastikan kesukaan pada tanaman yang barangkali dapat ditanam, pada saat pemupukan perlu dilaksanakan, tujuan membeli pupuk, dan bagaimana takaran pupuk yang harus dibutuhkan. Searah serta perkembangan pertanian, petani harus lebih banyak lagi membesarkan kemampuannya pada proses jual-beli, andaikata dalam menentukan pembelian bibit unggul, pupuk, atau alat pertanian baru.

Pandangan pertanian berdasarkan Tohir (2006:3) adalah suatu upaya yang melingkupi bidang-bidang bagaikan bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, perternakan, perkebunan, kehutanan, penyusunan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana zat atau bahan anorganik dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang berkarakter penggandaan dan usaha pelestariannya.

4. Pupuk

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuhan dan mengembangkan tanaman. Pupuk dapat memberikan melalui tanah, daun, atau ke batang tumbuhan. Berbagai macam dan ragam pupuk yaitu padat maupun cair. Pupuk dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam yaitu pupuk yang didapat langsung dari alam, seperti fosfat lingkungan, pupuk kandang, pupuk hijau, kompos. Pupuk alam dapat disebut sebagai pupuk organik karena merupakan hasil proses dekomposisi dari bahan makhluk hidup. Jenis pupuk lainnya yang dihasilkan dari proses pembuatan pabrik biasanya disebut dengan pupuk buatan. Pupuk buatan dibedakan atas pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal merupakan jenis pupuk yang mengandung satu macam unsur hara, misalnya pupuk N (nitrogen), pupuk P (posfat) K (kalium) pupuk tunggal yang mengandung unsur N dikenal pupuk urea, ZA (zavelvuure ammonium) biasa disebut ammonium sulfat. Pupuk yang mengandung P yaitu TSP (triple superphosfat) dan SP-36.

Pupuk saat ini sangat penting bagi petani, setiap tanaman diberi pupuk supaya tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Penggunaan pupuk kimia untuk pertanian di pandang memiliki efek negatifnya diantaranya memberikan polusi

baru bagi lingkungan. Pupuk organik untuk semua jenis bahan organik asal tanaman dan hewan yang dapat dirombak menjadi hara tersedia bagi tanaman. Dalam Permentana No.2/Pert/Hk.060/2/2006, tentang pupuk organik dan pembenah tanah, dikemukakan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruh terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk cair atau padat yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

Sejarah penggunaan pupuk pada dasarnya merupakan bagian daripada sejarah pertanian. penggunaan pupuk diperkirakan sudah mulai pada permulaan dari manusia mengenal bercocok tanam. Pemupukan untuk memperbaiki kesuburan tanah terdapat kebudayaan tua manusia di negri-negri yang terletak di daerah aliran sungai. Lahan-lahan pertanian yang terletak di sekitar aliran-aliran sungai sangat subur karena menerima endapan lumpur yang kaya hara melalui banjir yang terjadi setiap tahun. Di Indonesia sebenarnya pupuk itu sudah dikenal para petani mereka bahkan hanya mengenal pupuk organik sebelum revolusi hijau turut melanda pertanian di Indonesia. Setelah Revolusi Hijau kebanyakan petani lebih suka menggunakan pupuk buatan karena praktis menggunakannya, jumlahnya jauh lebih sedikit dari pupuk organik, harganya relatif murah karena di subsidi, dan mudah diperoleh. Kebanyakan petani sudah sangat tergantung pada pupuk buatan, sehingga dapat berdampak negatif terhadap perkembangan produksi pertanian, ketika terjadi kelangkaan pupuk dan harga pupuk naik karena subsidi dicabut. Tumbuhnya kesadaran akan dampak negatif penggunaan pupuk buatan dan sarana pertanian terhadap lingkungan pada sebagian kecil petani telah membuat mereka beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik.

Penyuburan tanaman terlalu berfungsi untuk pengembangan penghasilan pertanian yang bermutu baik atau banyaknya, pengurangan polusi alam, dengan menambah mutu tanah dengan terus-menerus. Penggunaan pupuk organik saja, tidak dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan ketahanan pangan. Oleh karena itu sistem pengelolaan hara terpadu yang memandukan pemberian pupuk organik/pupuk hayati dan pupuk anorganik dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan dan kelestarian perlu digalakkan. Penggunaan pupuk sampai sekarang sulit diperoleh. Penyebabnya adalah karena kebanyakan pupuk organik dan pupuk hayati diproduksi oleh pengusaha kecil dan menengah, pupuk organik banyak diproduksi untuk digunakan sendiri, dan jumlah penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati masih sangat terbatas.

Pupuk merupakan bahan yang ditambahkan manusia ke dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman dalam bertumbuh dan berproduksi. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk (Firmansyah, 2011).

Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan biologis, yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk. Pupuk organik adalah pupuk sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

5. Peran Dukuh Terkait ketersediaan Pupuk

Kepala Dusun merupakan kepala wilayah yang berperan menjadi perangkat yang mempunyai tanggung jawab dikewilayahan yang bertugas untuk mendukung kepala Desa dalam menjalankan perintah diwilayahnya. dan juga kepala Dusun mempunyai peran untuk melakukan upaya dalam pemberdayaan masyarakat untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan. Di Kalurahan Tileng Dukuh Juga mengambil peran dalam menyediakan pupuk untuk petani, dari pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi. bahkan bukan hanya dukuh saja yang mengambil bagian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Tileng namun semua pemerintah Kalurahan Tileng mengambil bagian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga melakukan kerjasama dengan BPP (Balai Pelatihan Pertanian) untuk meningkatkan pendapatan petani.

Di Kalurahan Tileng Dukuh mempunyai peranan dalam menyediakan pupuk untuk petani dalam mendukung semangat petani untuk mengelolah lahan pertanian, bukan hanya itu saja namun Dukuh juga mengabil peranan untuk turun langsung ke lapangan dalam membagikan bantuan seperti bibit padi, bibit jagung, dan lain sebagainya sebetulnya ini merupakan menjadi wewenang ketua kelompok tani, namun berbeda dengan yang terjadi Desa Tileng, dalam penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ini yang merupakan tanggungjawab kelompok tani dan penyuluh pertanian akan tetapi yang kita dapat ketahui dilapangan berbedah. Namun yang mengambil peranan dalam menyusun RDKK yaitu Dukuh sehingga dapat dikatakan bahwa Dukuh mempunyai peranan dalam menyediakan pupuk bagi petani.

Di Kalurahan Tileng berhubungan dengan pertanian pemerintah Kalurahan bermitra dengan kelompok tani, gapoktan, kelompok wanita tani dan juga bermitra

dengan Dukuh dalam menyediakan pupuk organik. Kepala Dusun memiliki fungsi bukan hanya sebagai kepala Dusun saja namun memiliki peran penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang ada diwilayahnya. sehingga dapat dikatakan bahwa Dukuh memiliki peran dalam menyediakan pupuk bagi petani di Kalurahan Tileng.

G. FOKUS PENELITIAN

Berangkat dari berbagai kebutuhan untuk mendapatkan data yang berdasarkan pada kerangka konseptual diatas dan dari tema yang coba diangkat “Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk” dapat menarik ruang lingkupnya untuk memfokuskan peneliti yang berlandasan pada ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pemetaan kebutuhan masyarakat tani dalam menyediakan subsidi pupuk
- b. Mekanisme pembagian pupuk bagi petani dalam meningkatkan kualitas pertanian
- c. Faktor-faktor pendukung dalam penguatan subsidi pupuk bagi masyarakat tani
- d. Faktor-faktor penghambat dalam penguatan subsidi pupuk bagi petani

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kualitatif

Bertujuan untuk memahami secara mendalam perilaku manusia dan alasan dilakukannya perilaku. Penelitian ini melihat variabel dan cara

mendapatkannya secara natural. Interaksi antara variabel dinilai sangat penting. Cara penelitian kualitatif disebut sebagai: cara penelitian naturalistic karena penelitiannya dilangsungkan pada kondisi alamiah (natural setting). Dan juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan sebagai sumbu penelitian. Metode penelitian kualitatif biasanya cenderung menggunakan teknik analisis mendalam. Penelitian kualitatif yaitu dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami latar belakang fenomena yang sedikitpun belum diketahui, dapat memperoleh wawasan tentang suatu yang hanya baru sedikit diketahui, serta memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata lisan atau tertulis yang berasal dari narasumber atau partisipan dan kemudian dicermati oleh peneliti. Segala data dipelajari secara mendetail agar makna yang tersirat dari dokumen atau benda dapat dipahami.

b. Penelitian Eksploratif

Penelitian eksploratif merupakan penelitian awal yang kajian-kajian dari satu isu masalah yang belum dipelajari atau diselidiki secara menyeluruh di masa lalu dan untuk memperdalam pengetahuan atau mencari ide-ide baru, serta untuk mendapatkan gambaran mengenai topik penelitian yang akan diteliti lebih jauh.

2. Unit Analisis

a. Objek penelitian yakni lokasi penelitian dengan tema “Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk Dikelurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

b. Subjek penelitian yakni pemilik informasi yang dibutuhkan penelitian adalah pemerintah desa Lurah, Carik, Dukuh, Ketua Gapoktan, dan masyarakat Kalurahan Tileng (Petani) yang berjumlah 10 orang narasumber, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Usia	Keterangan
1.	Suwardi S.Pd	Lurah	Strata 1	50	Lurahan Tileng
2.	Edi Saraya S.Pd	Carik	Strata 1	48	Carik Tileng
3.	Eka Indriyatna	Dukuh	SLTA/MA	39	Dukuh Ngringin
4.	Karsimin	Dukuh	SLTA/MA	51	Dukuh Ngrombo
5.	Suharno	Gapoktan	SLTA/MA	53	Ketua Gapoktan
6.	Saede	Petani	Putus Sekolah	51	Kelompok Jibar Jibur
7.	Ngatelan	Petani	SD/MI	40	Kelompok Tani Maju
8.	Daryono	Petani	Putus Sekolah	62	Kelompok Ngiringin
9.	Patriman	Petani	SD/MI	51	Kelompok Ngudi Lancar
10.	Jumiran	Petani	Putus Sekolah	50	Kelompok Makaryo

3. Teknik Penentuan Informan secara Purposive

Teknik Informan merupakan yang didasari pertimbangan bahwa informan di angap peneliti paling mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu orang-orang pilihan yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dikutip dalam bukunya Sugiyono (2017)

a. Observasi (pengamatan)

Nasution (1988) pengamatan menjadi inti pengetahuan. Pada artian para ilmuan hanya mampu bekerja menurut data yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi yang dilaksanakan. Mencuplik di dalam bukunya Sugiyono (2017)

b. Interview (wawancara)

Dalam KBBI wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari informasi, meminta keterangan, atau menanyai pendapat tentang suatu permasalahan kepada seseorang. Moleong (2007) yang menyatakan tanya jawab merupakan dialog yang dilakukan dua belah pihak merupakan pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam skripsi Urwanti (2018,26). Dan lebih nyata Susan Stainback adapun mengajukan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengenal hal-hal yang lebih luas tentang partisipasi dalam mengarikan situasi dan kejadian yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melewati observasi. Mengangkat dari dalam bukunya Sugiyono (2017)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan bukti melalui memilih informasi sekunder berbentuk dokumen-dokumen formal dan catatan-catatan yang disimpan sebagai dokumen.

Moleoong (2007,161) Proses pengambilan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang berhubungan melalui masalah penelitian. Dokumen menjadi sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menganalisis bahkan untuk beramalkan hasil penelitian.

Sedangkan berdasarkan Sugiyono (2013, 82) dokumentasi merupakan metode penghimpunan data dengan sistem mempertemukan sumber-sumber

data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian yang merupakan tulisan kejadian yang sudah lalu.

4. Teknik Analisis Data

Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berproses secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dikutip dari bukunya Sugiyono (2017)

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan seluruh data yang dapat dalam suatu penelitian baik berupa dokumen, observasi, maupun wawancara. Lebih tegas menurut Sugiyono yang mengatakan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara memperluas, dan dokumentasi atau gabungan kegiatannya. Dikutip di bukunya Sugiyono (2017)

Mengambil fakta penjelasan tentu melewati beragam metode dan sumber argumen informasi. kecuali melewati wawancara serta pengamatan, peneliti bisa mengambil manfaat observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, tulisan resmi, catatan individu dan gambar maupun foto. Pasti masing-masing sistem itu hendak mewujudkan petunjuk maupun informasi yang bertentangan, yang kemudian akan memberikan pemikiran yang berbeda hanya mengenai kejadian adapun diteliti. Berbagai macam pemikiran itu menciptakan kemudahan pengetahuan untuk mencapai kebenaran yang membuktikan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknis analisis data kualitas. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan gabungan informasi disusun maka dari itu memberi kemungkinan akan adanya pencabutan kesimpulan. Berbentuk naskah narasi (gambaran tulisan diarena), kerangka, tabel, jaringan serta diagram. Lebih tegas dari Sugiyono yang berpendapat penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Mulai penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dikutip dalam bukunya Sugiyono (2017)

Pada penyajian data penulis akan melakukan analisis terhadap data yang telah direduksikan. Penulis melakukan analisis secara eksploratif sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan teknik pengumpulan data yang diambil. Penulis juga menyediakan data dalam bentuk tabel, gambar dan narasi yang peneliti daftar berdasarkan hasil temuan dilapangan maupun

dalam berbagai pustaka yang peneliti mengambil manfaatnya. Data yang dijadikan untuk peneliti beragam temuan data hasil wawancara, pengamatan dan data berupa narasi yang peneliti diperoleh selama penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Penambahan keputusan adalah pendapatan penjabaran serta mampu dimanfaatkan sebagai kegiatan. Pencabutan keputusan merupakan upaya untuk memecahkan atau mengerti makna atau arti, kecocokan, pola-pola, pengertian, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasikan dengan aturan melihat atau mempertanyakan ulang sambil mengamati catatan lapangan agar memperoleh pengetahuan yang lebih cepat.

BAB II

PROFIL KALURAHAN TILENG

A. SEJARAH KALURAHAN TILENG

Kalurahan Tileng berdiri pada tahun 1921 pecahnya perang besar antara Prabu Brawijaya v di Kerajaan Majapahit dan Raden Pata dari kerajaan Demak. Diceritakan karena saat sebelum tahun 1921 di wilayah Tileng banyak terjadi kekacauan dan kejadian-kejadian yang membuat warga tidak nyaman, sehingga dari Keraton Ngayogyakarta memerintahkan bapak Kariyo Suparto dan nama Suparto pemberian dari pajejenganipun sinuwun Hamengku Buwono ingkang kaping VIII dan diberi kuasa untuk memimpin menentramkan Tileng. Setelah jaman kemerdekaan RI pemerintah membentuk aturan baru yang menyebutkan bahwa pemimpin desa harus bisa membaca dan menulis, atas dasar tersebut maka masa kepempinan Bapak. Sugeng terjadi pula pemekaran padukuhan diantaranya: Padukuhan manggung, padukuhan Ngalangombo, padukuhan Teken, padukuhan Tileng, padukuhan Mloko, padukuhan Sentul, padukuhan Ngasem, padukuhan Nanas, padukuhan Mandesan, padukuhan Pugeran, padukuhan Papingan, padukuhan Ngrombo, padukuhan Sawah, padukuhan Banaangung, padukuhan Ploso, dan padukuhan Ngringin. Masa kepemimpinan kepala kalurahan di Tileng yang mengalami pergantian beberapa kali diantaranya sebagai berikut:

1. Kariyo Suparto

Priode: Tahun 1921 samapi Tahun 1936

2. Sugeng

Priode: Tahun 1936 samapi Tahun 1988

3. Sukino

Priode: 22 Agustus 1988 samapi 25 Desember 1991

4. Citro
Priode: 25 Desember 1991 – 21 April 1994
5. Sastro Sarjono
Priode: 21 April 1994 – 18 Maret 2000
6. Pawiro Dikromo
Priode: 18 maret 2000 – 16 Juli 2002
7. Sastro Sukarno
Priode: 16 Juli 2002 – 27 November 1990
8. Wahabi
Priode: 27 November 1990 – 27 November 1997
9. Parman Purwo Atmojo
Priode: 27 November 1997 – 27 November 2007
10. Drs. Supriyadi
Priode: 27 November 2007 – 27 November 2019
11. Karyanto S.IP (Pj. Kades)
Priode: 27 November 2019 – 31 Desember 2019
12. Suwardi, S.Pd
Priode: 31 Desember 2017 – sekarang

Dalam kepemimpinan Suwardi, S.Pd membentuk sejarah baru pada tanggal 3 juni 2022, terlahir di Kalurahan Tileng yaitu Pencanaan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul sebagai Kampung Pancasila yang bertempat di Pendopo Balai Kalurahan. Kegiatan yang dilakukan dan difasilitasi oleh Koramil Kabupaten Gunungkidul ini berjalan dengan tertib dan lancar. Adapun peserta yang hadir dan mengikuti proses sejarah baru yaitu adanya pencanaan Kampung Pancasila ini adalah Bapak Panewu Girisubo dan Forkompimkap, seluruh elemen

masyarakat dari berbagai Organisasi/Lembaga kalurahan. Tujuan dibentuknya Kampung Pancasila yaitu untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila yang ada di NKRI. Bisa mewujudkan serta menjadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, sikap toleransi antar umat beragama agar terbingkai dalam Kebineka Tunggal Ika'an.

Dalam kepemimpinan Bapak Suwardi, S.Pd mengangkat predikat Kalurahan Tileng sebagai Kalurahan Maritip. Adapun Kalurahan Tileng ditetapkan sebagai Kalurahan Maritim, sebagai penyanggah dalam penguatan Kalurahan pesisir dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang akan mengelolah sumberdaya alam laut. Salah satu program Desa Maritim di Kalurahan Tileng yaitu membangun Sekolah Alam Pesisir yang mana sekolah ini untuk pelantikan kegiatan perikanan tangkap dan pengolahan hasil tangkapan hasil laut. Harapan dari bapak Suwardi S.Pd sebagai lurah dengan adanya pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir mampu menghasilkan SDM baru yang berpotensi dalam bidang kemaritiman dan terus membangun infrastruktur dalam memajukan sumberdaya manusia dalam bidang Maritim baik dari hulu hingga hilir. bapak Suwardi S.Pd dengan tekatnya berjuang untuk mencapai Pemerintah Kalurahan Tileng sudah sejalan dengan apa yang di inginkan Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan memberikan dana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah pesisir, dan sudah jelas apa yang dikatakan Sultan Hamengku Buwono X bahwa akan merubah pintu masuk Yogyakarta dari arah pesisir sehingga Kalurahan Tileng sebagai Kalurahan Maritim.

B. GEOGRAFIS

Kalurahan Tileng terdapat di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan letaknya, jarak Kalurahan Tileng ke ibu kota kecamatan terdekat sejauh 1 km dan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 5 Menit, jarak ke ibu kota kabupaten 40 km dan lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten mencapai 1 jam. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Nglindur, sebelah selatan Samudra Indonesia, bagian dari Timur berbatasan dengan Kalurahan Jeruk Wudel dan Kalurahan Pucung, bagian barat berbatasan dengan Kalurahan Karangawen dan Kalurahan Jepitu. Secara geografis Kalurahan Tileng Wilayah berada dipinggiran Selatan Kabupaten Gunung Kidul yang kondisi penggunaan Wilayah yang terbentuk hingga saat ini terdiri atas lahan pemukiman, laut atau Kawasan pesisir, dan persawahan tadah hujan. Secara administrasi Kalurahan Tileng terdiri dari 16 Pedukuhan dengan 49 Rukun Tetangga (RT). Dengan Luas wilayah Kalurahan Tileng 17,721 Ha.

Tabel 1. Pedukuhan di Kalurahan Tileng

No	Nama Padukuhan	RT
1.	Manggung	2 RT
2.	Ngalangombo	2 RT
3.	Teken	2 RT
4.	Tileng	2 RT
5.	Mloko	2 RT
6.	Sentul	2 RT
7.	Ngasem	4 RT
8.	Nanas	4 RT
9.	Madesan	4 RT
10.	Pugeran	4 RT
11.	Papringan	4 RT
12.	Ngrombo	4 RT
13.	Ploso	4 RT
14.	Sawah	3 RT
15.	Banagung	3 RT
16.	Ngringin	3 RT
Jumlah		49

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Kalurahan Tileng memiliki 16 padukuhan dan 49 Rukun Tetangga (RT). Data Kalurahan Tileng menunjukkan jumlah RT paling banyak terdapat di Padukuhan Ngasem, Nanas, Madesan, Pugeran, Papringan, Ngrombo, dan Ploso yang memiliki 4 RT disetiap padukuhan. Sedangkan dari padukuhan Sawah, Banagung, dan Ngringin memiliki 3 RT disetiap pedukuhan. Dan dipadukuhan Manggung, Ngalangombo, Teken, Tileng, Mloko, dan Sentul merupakan padukuhan yang memiliki RT paling sedikit di Kalurahan Tileng dengan jumlah 2 RT disetiap pedukuhan.

Tabel 2. Penggunaan Lahan di Kalurahan Tileng

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	115,20 Ha
2.	Pertanian sawah	0,00 Ha
3.	Ladang	107.600,00 Ha
4.	Perkantoran	211,70 Ha
5.	Sekolah	3,65 Ha
6.	Lapangan sepak bola	1,5 Ha
Jumlah		107.932,05 Ha

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Masyarakat di Kalurahan Tileng mayoritas pekerjaannya bertani sehingga dalam penggunaan lahan di dominasi bidang pertanian pada lahan kering. Di Kalurahan Tileng didominasi masyarakat petani sehingga dalam penggunaan lahan paling banyak untuk sektor pertanian yaitu perkebunan dan persawahan tadah hujan selain di lahan pertanian masyarakat dan pemerintah setempat membagi lahan untuk perkantoran, sekolah, dan lapangan sepak bola.

C. DEMOGRAFIS

Demografis di wilayah kalurahan, sangat penting untuk pemerintah kalurahan dengan adanya demografis pemerintah dapat mengetahui keadaan masyarakatnya dengan data yang ada. Analisi penduduk dapat dilihat dari masyarakat yang bertempat tinggal dikalurahan tersebut atau umur, pekerjaan, dan tingkat Pendidikan.

1. Jumlah penduduk

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana total penduduk yang dapat berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, serta perpindahan.

Tabel 3. Usia penduduk dan jenis kelamin

No	Usia			
	Laki-Laki	Jumlah	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 6 Tahun	125	0 – 6 Tahun	119
2.	7 – 12 Tahun	108	7 – 12 Tahun	144
3.	13 – 18 Tahun	178	13 – 18 Tahun	189
4.	19 – 25 Tahun	181	19 – 25 Tahun	211
5.	26 – 40 Tahun	453	26 – 40 Tahun	490
6.	41 – 55 Tahun	479	41 – 55 Tahun	451
7.	56 – 65 Tahun	312	56 – 65 Tahun	276
8.	65 – 75 Tahun	319	65 – 75 Tahun	286
9.	>75 Tahun	26	>75 Tahun	21
Total		4.368		

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Jumlah penduduk kalurahan tileng adalah 4.321 orang dengan jumlah rincian laki-laki sebanyak 2.155 orang dan perempuan terdiri dari 2.166 orang. Penduduk paling tinggi menurut jenis kelamin yaitu perempuan yang sebanyak 2.166 orang. Berdasarkan informasi diatas kalurah tileng paling banyak yang berusia 26-40 yang berjumlah 490 dari jenis kelamin perempuan sedangkan dari jenis kelamin laki-laki paling didominasi di usia 41-55 dengan jumlah 479 orang. Untuk usia paling rendah terdapat di usia 75 tahun untuk laki-laki berjumlah 26 orang sedangkan dari jenis kelamin perempuan terdapat di usia yang sama yaitu 75 tahun dengan jumlah 21 orang.

2. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4. Tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/ MI	1.559 orang
2.	SLTP/ MTs	846 orang
3.	SLTA/ MA	532 orang
4.	S1/ Diploma	74 orang
5.	Putus Sekolah	1.357 orang

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Berdasarkan data diatas tingkat Pendidikan dikalurahan Tileng paling banyak yang terdapat pada SD/ MI yang berjumlah 1.559 orang, dan dibandingkan dengan tingkat Pendidikan yang lain. Dan yang putus sekolah berjumlah 1.357 orang, yang paling rendah S1/ Diploma yang berjumlah 74 orang. Kalurahan tileng didominasi yang SD/ MI dan yang putus sekolah. Menurut daftar diatas mampu diketahui bahwa Kalurahan Tileng memiliki warga bahwa mayoritas SD dan putus sekolah, sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk Kalurahan Tileng berdasarkan tingkat Pendidikan yang bermata pencaharian sebagai petani.

3. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Table 5. Berdasarkan mata pencaharian Kalurahan Tileng

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	3.228 orang
2.	Pedagang	134 orang
3.	PNS	26 orang
4.	Tukang	64 orang
5.	Guru	38 orang
6.	Bidan/Perawat/Dokter	7 orang
7.	TNI/Polri	2 orang
8.	Pensiunan	36 orang
9.	Buruh/Tani	537 orang
10.	Jasa Persewaan	1 orang
11.	Swasta	682 orang

Sumber: Teroleh dari profil kalurahan Tileng Tahun 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa di kalurahan tileng di dominasi masyarakat yang pekerjaannya sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan, penduduk Kalurahan Tileng menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk bertani dan berternak. Yang dengan tingkat Pendidikan SD sangat menyulitkan penduduk untuk mencari pekerjaan disektor lain sehingga tidak ada pilihan lai bagi masyarakat menekuni di bidang pertanian. Di Kalurahan Tileng swasta merupakan urutan kedua jumlah yang banyak. Swasta sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat suatu bagian dalam memberikan dorongan dan motivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, dan urutan selanjutnya ada buruh dan pedagang. Sesuai data yang ada di atas dapat dikatakan kalurahan tileng sebagian besar adalah masyarakat yang bergantung sama sektor pertanian sehingga dengan hal ini pemerintah kalurahan tileng perlu untuk memperhatikan dibidang pertanian.

D. BUDAYA

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki lingkungan geografis. Dari lingkungan geografis itu lah membuat Indonesia menjadi salah satu faktor utama terbentuknya aneka macam suku bangsa, budaya dan Bahasa. Tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat yang dapat terwujud sebagai komunitas desa, sebagai kota, sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat, bisa menampilkan suatu corak yang khas terutama warga masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut termanifestasi dalam bentuk kepercayaan dan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan kepribadian antara satu suku dengan suku yang lain. Perubahan dalam kehidupan suatu masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari manusia. Budaya dalam masyarakat dapat terjadi pada nilai-nilai budaya, norma-norma budaya, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, dan interaksi sosial. Yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Fenomena dinamika budaya terjadi pula dalam kehidupan masyarakat di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Masyarakat kalurahan tileng memiliki pola kehidupan dan adat istiadat yang sedikit berbeda dengan masyarakat jawa lainnya. Budaya yang berkembang di kalurahan tileng adalah budaya masyarakat yang memiliki karakter gotong royong dan kekeluargaan masyarakatnya tinggi. Memiliki kesenian dikalurahan tileng banyak beragam yang beragam adat jawa seperti kesenian jatilan, genduri, dan ketoprak. Di kalurahan tileng genduri merupakan budaya yang merupakan ungkapan rasa sukur masyarakat atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Proses genduri ini diawali dengan berkumpulnya masyarakat disuatu tempat dengan masing-masing membawa nasi tumpeng kecil yang berisi nasi berbentuk segitiga atau gunung, telur rebus dan sayuran kemudian nasi tumpeng itu ditaruh tengah dan masyarakat duduk melingkar, setelah itu salah satu tokoh masyarakat membacakan ungkapan rasa sukur dengan bahasa jawa dan ditutup dengan doa sesuai syariat islam karena penduduk kalurahan tileng mayoritas beragama islam.

Kalurahan tileng memiliki budaya yang kaya. Budaya tersebut dapat tercermin dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, kesenian maupun dari sifat masyarakatnya. Masyarakat kalurahan tileng memiliki event tahunan yang disebut sebagai Rasulan. Rasulan ini diadakan 16 kali dalam setahun di 16 pedukuhan berbeda. Isi dari kegiatan rasulan bermacam-macam, mulai dari jatilan, ketoprak, campur sari, gamelanan, dan wayang. Setiap pedukuhan memiliki agenda keseniannya masing-masing, seperti gamelanan dan tarian tradisional. Masyarakat kalurahan tileng merupakan masyarakat yang berbudaya, hal ini tercermin dari masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong, saling membantu, dan ramah satu sama lainnya.

Sejak manusia diturunkan ke muka bumi, ia telah memulai kehidupannya secara bersama. Ia memulai pola hidup berkeluarga, membentuk guyub dalam sistem masyarakat, dan akhirnya sampai pada pola yang modern semacam “negara”. Dilihat dari perkembangan dapat dikatakan bahwa konteks peranan, hak, dan kewajiban manusia perseorangan dalam keberadaannya Bersama-sama kelompok memunculkan kebolehan dan larangan. Prilaku terus-menerus yang dilakukan secara perseorangan menimbulkan kebiasaan, demikian seterusnya pada prilaku peranan kelompok muncul kebiasaan, dan bila dilakukan seluruh anggota masyarakat, lambat-laun akan menjadi “adat”. Dengan demikian adat adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bersangkutan.

Perilaku manusia khususnya yang terkait dengan hukum adat sangat menarik untuk dilakukan. Hal ini disebabkan tidak saja karena uniknya hukum dalam problematika fenomena sosialnya yang dipengaruhi factor ekonomi, politik, social, dan budaya, namun hukum adat telah merupakan bagian penting dalam suatu disiplin hukum. Kenyataannya di masyarakat ketentuan mengenai hukum adat karena bermakna ideal tetap dipertahankan, sedangkan perilaku menyimpang akan dikenai sanksi.

Adat merupakan percerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Jadi kalau ada penyebutan “adat jawa”, maknanya adalah tatanan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat jawa.

E. POTENSI EKONOMI

Potensi yang dimiliki kalurahan Tileng merupakan suatu faktor yang mendorong kemajuan dalam akselerasi pembangunan di kalurahan tileng adanya hubungan yang sinergis antara pemerintah kalurahan dengan Lembaga, adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik, jumlah SDM yang cukup memadai, kesadaran masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi, masih kental jiwa kegotongroyogan, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang pontensibal untuk usaha ekonomi, tersedianya jaringan transportasi menjangkau seluruh padukuhan, letak geografis kalurahan tileng dekat dengan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan, dan kepedulian masyarakat cukup tinggi.

Untuk mencukupi kebutuhan keperluan warga masyarakat kalurahan tileng harus bekerja dan berusaha agar kebutuhannya dapat memenuhi dengan layak. Jika dilihat dari

segi ekonomi matapencaharian penduduk sebagai petani, juga peternak sapi dan kambing, dan usaha-usaha kecil-kecilan.

Kalurahan tileng adalah kalurahan yang kemajuan ekonominya yang termasuk kategori sedang. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga masyarakat kalurahan tileng merupakan petani dan peternak. Masyarakat meningkat banyak melebarkan potensi ekonomi desa menempuh aktifitas pertanian dan peternakan. Hasil pertanian saat ini sebagian besar sedang dijual dalam gambaran orisinalnya karena belum semua di olah menjadi suatu produk perdagangan yang dapat menaikkan nilai jual beli. Namun untuk saat ini sudah ada usaha dari perorangan maupun kelompok masyarakat yang mulai membesarkan penggarapan hasil pertanian menjadi bahan makanan atau kerajinan yang bernilai jual tinggi.

Kecuali menggantungkan sektor pertanian, masyarakat Tileng juga menggantungkan dirinya di sektor peternakan yaitu melalui beternak sapi dan domba ini merupakan kegiatan sampingan sehingga perolehannya meski sudah dapat mendukung memenuhi keinginan masyarakat namun belum dapat diperlukan sebagai mata penghidupan inti yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kalurahan tileng sendiri untuk meningkatkan ekonomi dilingkungan desa melewati Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai basis usaha menurut kehidupan di kedudukan desa dan mampu menjangkau semua masyarakat.

Adapun perekonomian kalurahan Tileng di topang oleh kegiatan pertanian dan peternak. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya terkait dengan sektor pertanian ketela, kacang, rumput sapi, dan masih banyak lagi. Dan adapun dari sektor peternakan yaitu ternak sapi dan kambing. Mata pencaharian petani, buruh tani, penegepul atau pedagang, berhubungan dengan pertanian dan peternakan dan keseharian warga masyarakat tileng di lading.

F. PERTANIAN

1. Kondisi Pertanian

Kalurahan Tileng yang merupakan penduduk mayoritas petani maka dapat diketahui bahwa Tileng memiliki luas lahan pertanian 107.600,00 Ha. Model bertanaman di Kalurahan Tileng yaitu tumpang sari yang sudah dilakukan sejak dari nenek moyang terdahulu sehingga dilakukan turun temurun hingga saat ini, melihat dari kondisi tanah yang merupakan ladang, yang merupakan tadah hujan sehingga musim tanam dan panen dilakukan setahun sekali. Yang dilakukan petani pada saat dalam menghadapi pada musim tanam masyarakat petani melakukan dengan cara digaruk sehingga petani di Kalurahan Tileng melakukan penanaman benih karena sengaja untuk menghadang pada musim hujan tiba.

Secara geografis Kalurahan Tileng terletak di ujung selatan Kabupaten Gunungkidul yang sangat berdekatan dengan laut sehingga petani melakukan penanaman benih hanya dilakukan satu kali dalam setahun. karena ladang atau sering dikatakan warga sekitar lahan kering dan tadah hujan maka hanya dilakukan saat pada musim hujan. Kalurahan Tileng yang mempunyai keragaman jenis tanah yang cocok ditanamin gabah, jagung, kedelai, tebu, tembakau, jati, dan jambu mete. Urusan yang dikerjakan oleh petani di Kalurahan Tileng yaitu pertanian dan peternakan. Hasil pertanian dan peternakan kalurahan tileng dapat kita lihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 7. Produk pertanian dan peternakan

No	Pertanian dan Peternakan	Hasil
1.	Jenis Tanaman	
	Padi ladang	52 ton
	Jagung	2 ton
	Padi sawah	4 ton
	Singkong	2,1 ton
2.	Jenis Ternak	
	Kambing	3.807 ekor
	Sapi	3.344 ekor
	Ayam	5.835 ekor

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Menurut data diatas kalurahan tileng memiliki hasil pertanian jenis padi lading yang mencapai hasil 52 ton, sedangkan padi sawah mencapai 4 ton, dan hasil jagung 2 ton. Jika dilihat dari hasil peternakan dari jenis ternak ayam paling banyak dari jenis-jenis ternak lain yang mencapai 5.835 ekor, sedangkan jenis ternak kambing mencapai hasil 3.807 ekor, dan sapi mencapai 3.344 ekor. Jika dibandingkan dari hasil pertanian dan peternakan lebih banyak hasil peternakan yang jumlah keseluruhan mencapai 12.986 ekor ternak, sedangkan hasil pertaniannya mencapai hasil 60,1 ton. Jika dilihat dari luas lahan pertanian untuk lading mencapai luas 107.600,00 Ha tidak sebanding dengan hasil pertanian dan luas lahan maka pemerintah kalurahan tileng perlu memaksimalkan hasil pertanian agar terus meningkat. Kalurahan tileng mempunyai produksi pertanian untuk dapat meningkatkan pendapatan petani, yaitu memiliki produksi pertanian seperti padi, jagung, tembakau, tebu, coklat, kelapa, singkong, pisang, cabai, dan kacang tanah. Dari hasil peternakan kambing, sapi, ayam, itik, dan burung. Dan untuk perikanan yaitu tambak ikan, tambak udang, dan lele. Kalurahan Tileng mempunyai kelompok tani yang dapat diketahui dibawa:

Tabel 8. Nama-Nama Kelompok, Jumlah Anggota, dan Alamat.

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Alamat
1	Manunggal	65 orang	Ngalangombo
2	Ngudi Basuki	60 orang	Teken
3	Jibar Jibur	64 orang	Tileng
4	Ngudi Makmur	52 orang	Sentul
5	Ngudi Lancar	90 orang	Ngrombo
6	Makaryo	64 orang	Papringan
7	Adem Ayem	78 orang	Ngasem
8	Akur	68 orang	Manggung
9	Banagung	88 orang	Banagung
10	Makmur	71 orang	Sawah
11	Mandesan	77 orang	Mandesan
12	Tani Maju	80 orang	Pugeran
13	Ngringin	60 orang	Ngiringin
14	Tani Makmur	67 orang	Nanas
15	Subur	45 orang	Mloko
16	Ploso	112 orang	Ploso

Sumber: Data Gapoktan Kalurahan Tileng Tahun 2022

Data di atas merupakan nama kelompok yang ada di Kalurahan Tileng yang dapat mengerjakan sektor pertanian, dan peternakan yang ada di Kalurahan Tileng, hadirnya kelompo-kelompok tani yang ada di Kaluraha Tileng untuk dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelolah bidang pertanian yang mereka miliki dan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Tileng. Untuk itu dapat diketahui bahwa jumlah anggota kelompok paling banyak terdapat pada kelompok Ploso yang bertempat di padukuhan Ploso yang berjumlah anggota 112 orang dan di ikuti kelompok Ngudi Lancar yang jumlah anggota 90 orang, kelompok Ngudi Lancar bertempat dipadukuhan Ngrombo. Untuk kelompok lain yang ada di Kalurahan Tileng berjumlah anggota dibawah dari kelompok Ploso dan Kelompok Ngrombo.

G. PEMERINTAHAN

1. Visi dan Misi Kalurahan Tileng

Visi dan Misi Kalurahan Tileng Visi merupakan suatu rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan organisasi atau lembaga. Berisi pikiran-pikiran yang terdapat dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu gambaran dari masa depan organisasi yang ingin dicapai. Ada juga yang berpadang mengenai arah manajemen lembaga. Sangat menentukan akan dibawah kemana lembaga yang bersangkutan di masa depan. Adanya visi dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah organisasi atau Lembaga harus memiliki arah yang jelas.

Visi Kalurahan Tileng tidak sekedar visi lurah terpilih namun pada dasarnya suatu visi dari seluruh masyarakat Kalurahan Tileng. Maka dari itu penyusunan visi Kalurahan Tileng dilangsungkan melalui serangkaian proses panjang yang melibatkan segenap perangkat masyarakat dan seluruh unsur kelembagaan di Kalurahan Tileng.

VISI: "TILENG MAJU BARENG"

MISI

Membangun tim kinerja internal Kalurahan yang solid dan harmonis

1. Membangun mitra kerja yang baik, santun dengan birokrasi, swasta, dan semua pihakterkait yang berkepentingan guna percepatan pembangunan disemua sector secara bertahap dan berkesinambungan
2. Melakukan penguatan dan memberi apresiasi kepada penguyuban yang ada dikalurahan

3. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang produktif dan berbasis budaya serta kearifan lokal
4. Menjalankan etos kerja dengan pelayanan yang rama, rendah hati, tepat waktu, jujur, dan adil
5. Mengembangkan potensi generasi muda melalui kegiatan olahraga, budaya, dan ketrampilan yang produktif yang berbasis kearifan lokal

2. Lembaga Pemerintahan

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa didalam pemerintah terdapat Lembaga pemerintahan yang mengatur dan mengurus desa. Seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Table 9. Lembaga Pemerintahan

No.	Aparat Desa	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Perangkat Desa	27 orang
4.	BPD	9 orang
	Total	30 orang

Sumber: profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Menurut tabel diatas dapat didapati bahwa kalurahan tileng mempunyai aparat kalurahan yang berjumlah keseluruhan 30 orang. Dari Lembaga Pemerintahan di Kalurahan Tileng dari Lurah, Sekretaris, serta pegawai kalurahan ialah menjadi pemberi pelayanan terhadap masyarakat di Kalurahan Tileng.

3. Lembaga kemasyarakatan

Kalurahan tileng mempunyai Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra pemerintahan kalurahan dalam memperdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan diakui dan dibina oleh

pemerintah, dan tercatat dalam pemerintahan kelurahan. Maka kalurahan tileng mempunyai Lembaga kemsayarakatan yang terdapat di tabel dibawah ini:

Table 10. Lembaga Kemasyarakatan

No.	Lembaga	Jumlah
1.	LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)	16 kelompok
2.	PKK	1 kelompok
3.	Posyandu	16 kelompok
4.	Pengajian	16 kelompok
5.	Arisan	49 kelompok
6.	Simpan Pinjam	49 kelompok
7.	Kelompok Tani	16 kelompok
8.	Gapoktan	1 kelompok
9.	Karang Taruna	1 kelompok
10.	Risma	16 kelompok
	Total	165 kelompok

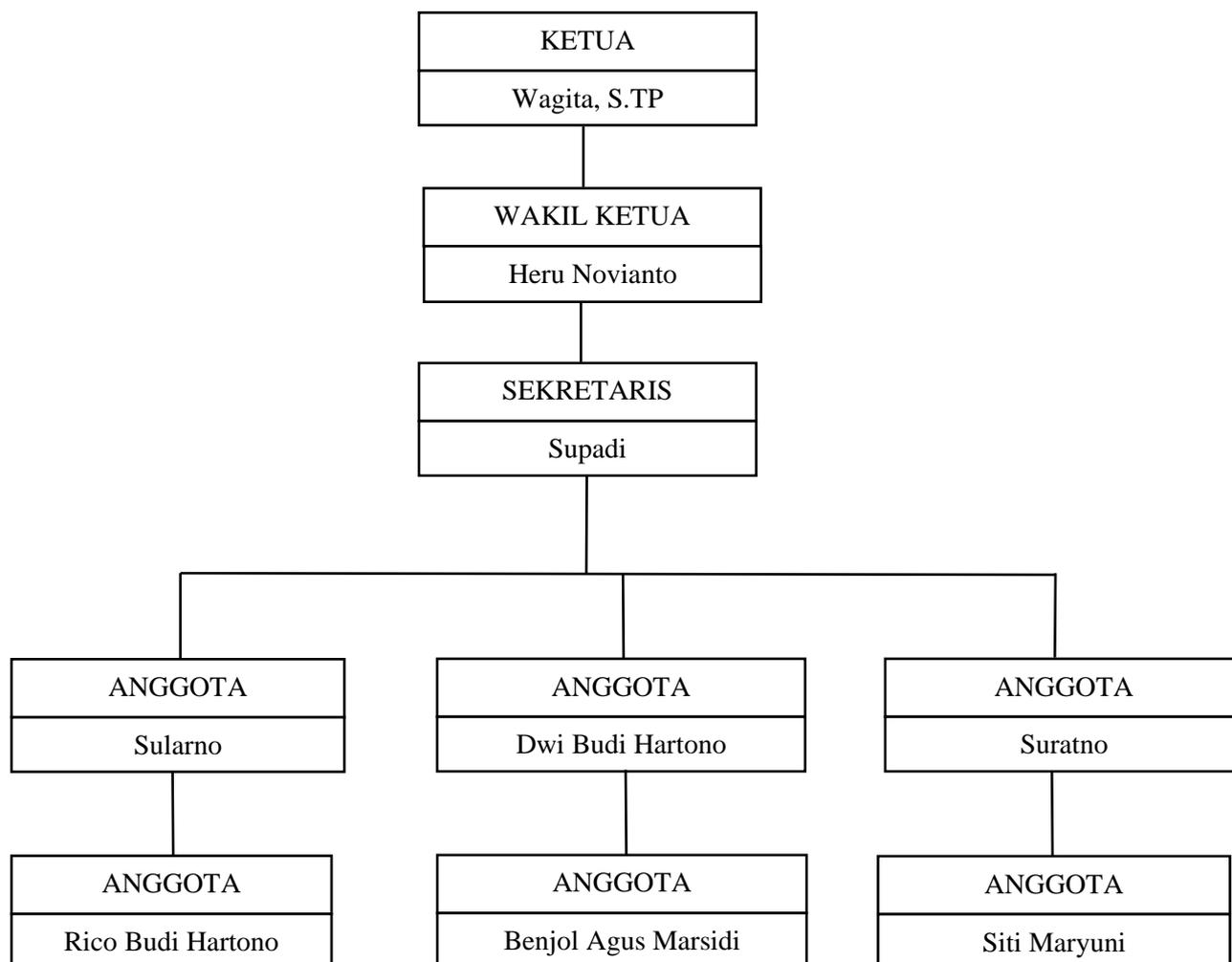
Sumber: Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kalurahan tileng memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang berjumlah keseluruhan mencapai 165 kelompok. dari Lembaga di atas, ada Lembaga Arisan dan Simpan Pinjam yang masing-masing memeiliki 49 kelompok, disertai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Posyandu, pengajian, kelompok tani, dan Risma (Remaja islam masjid) yang masing-masing memiliki 16 kelompok. dan yang memiliki sedikit kelompok yaitu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Gapoktan, dan Karang Taruna cuman memiliki 1 kelompok. dari Lembaga yang ada diatas semuanya masih aktif sampai saat ini.

4. Struktur Organisasi kalurahan tileng

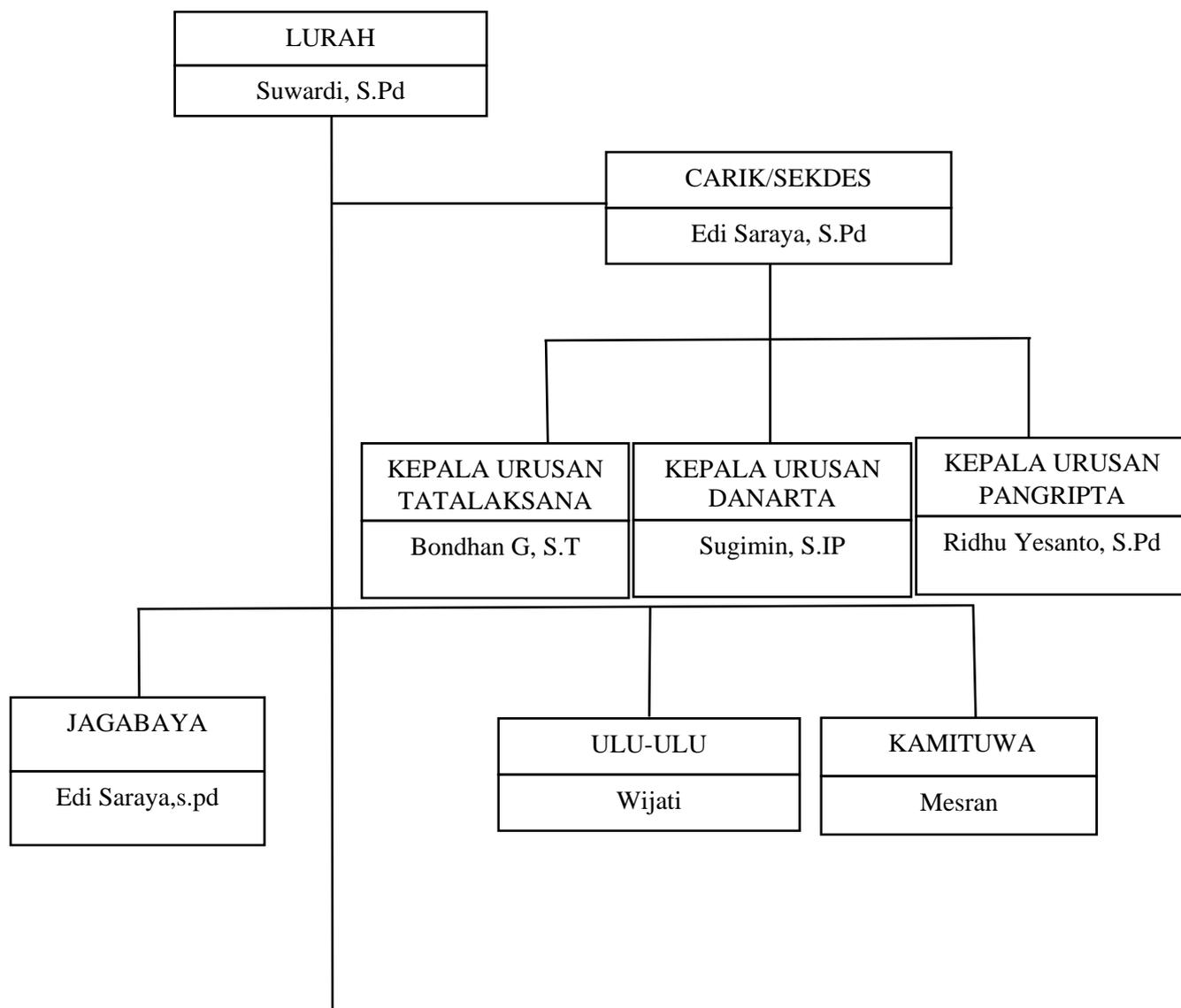
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa suatu sistem dalam kelembagaan pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Kepala Desa didukung oleh elemen Desa. Perangkat Desa berpangkat sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terjadi dari Sekretariat Desa, Penerapan Kewilayahan, dan Pelaksanaan Teknis. Susunan Organisasi Pemerintahn Kalurahan Tileng dapat terlihat dibagan sebagai berikut:

Bagan 1. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Sumber: Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Bagan 2. Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Tileng



1	Dukuh Manggung	Margono,S.IP
2	Dukuh Ngalangombo	Misdiyanta
3	Dukuh Teken	Sujarwo
4	Dukuh Tileng	Suyatin
5	Dukuh Sentul	Sutikno
6	Dukuh mloko	Marsait
7	Dukuh Ngasem	suwarno
8	Dukuh Nanas	Heru Nufiyanta
9	Dukuh Mandesan	Sagimin
10	Dukuh Pugeran	Pangat
11	Dukuh Papringan	Suharno
12	Dukuh Ngrombo	Karsimin
13	Dukuh Sawah	Vinsensius Subayato
14	Dukuh Banagug	Rubiyo
15	Dukuh Ploso	Mursiyanto
16	Dukuh Ngringin	Eka Indriyatna

Sumber: Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kapasitas dari Pemerintah Kalurahan Tileng menegaskan kepada petani untuk tetap memakai pupuk organik supaya tetap menjaga kesuburan tanah secara alami dan untuk pupuk kimia Pemerintah Kalurahan Tileng mengurangi karena dalam pengguna pupuk kimia yang secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan unsur hara yang ada dalam tanah. Sehingga pemerintah tidak banyak berbuat dalam bantuan pupuk bersubsidi yang berjenis pupuk kimia. Dan Pemerintah Kalurahan Tileng berupaya untuk melakukan tindakan pelatihan dalam pengolahan pupuk organik untuk menutupi kebutuhan petani. Pemerintah mempunyai harapan untuk kelompok tani yang ada di Tileng dalam waktu dekat akan di adakan pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang dimana akan membantu dan mempermuda kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Pemerintah Tileng punya upaya lain dalam memberikan pelayanan dalam mencukupi kebutuhan pupuk dengan cara melakukan sekolah lapang yang artinya praktek langsung dilapangan dalam membuat pupuk kompos dari limbah kandang sapi.

Yang menghambat Kapasitas Pemerintah Kalurahan Tileng untuk memenuhi kebutuhan pupuk untuk petani, pemerintah mencoba melakukan kegiatan pelatihan dalam pembuatan pupuk kompos dari limbah kandang sapi yang diwakili setiap kelompok satu orang, namu gagal dalam penerapan dalam setiap kelompok karena yang mengikuti pelatihan tersebut tidak menyampaikan hasil dari apa yang sudah dipraktekkan dalam mengikuti pelatihan. Dari Dinas Pertanian mengurangi pemeberian pupuk bagi petani, dari persoalan itu Pemerintah Kalurahan Tileng mendapatkan kesulitan dalam mengajukan permintaan pupuk bersubsidi. Sehingga dari Pemerintah

Kalurahan Tileng merencanakan pengelolaan limbah kandang sapi, dan itupun juga Pemerintah Kalurahan Tileng mendapatkan kesulitan dalam menghadirkan orang yang ahli dalam bidang pengelolaan limbah kandang menjadi pupuk kompos. Yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kalurahan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dikalurahan tileng belum mempunyai RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sehingga kelompok tani mendapatkan kesulitan dalam memperoleh pupuk subsidi dari Dinas Pertanian, ini merupakan salah satu penghambat dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan judul Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Adapun saran yang akan di berikan kepada Pemerintah Kalurahan Tileng berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

- a. Guna meningkatkan Kapasitas Pemerintah Kalurahan Tileng kepada petani maka perlu adanya pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
- b. Pemerintah Kalurahan bekerjasama dalam hal meningkatkan Kapasitas alokasi pupuk untuk petani maka perlu adanya forum pelatihan bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin Agus, 2015. *Pola Hubungan Pemerintah Desa dan Parlemen Desa Menuju Good Governance*, Fisip UNTAG Semarang.
- Bahua Ikbal, 2016. *Kinerja Penyuluhan Pertanian*, Yogyakarta.
- Diliarosta Skunda, 2021. *Prilaku Petani Berwawasan Lingkungan*, Global Aksara Pres Surabaya.
- Dwi Ismantoro 2011. *Memahami Berbagai Etika Propesi dan Pekerjaan*, Media Pressindo.
- Faujiah Lina, 2019. *Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dalam Pembangunan Desa*, UIN Raden Intan Lampung.
- Hermawan Endang, 2021. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ilmar Aminuddin, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana Jakarta.
- Iskandar Johan, 2006. *Metodologi Memahami Petani dan Pertanian*, Bandung.
- Juwita Shiane, 2019. *Buku Pegangan Karang Taruna*, Hikam Media Utama.
- Maulidiah Sri, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, Nusa Media Yogyakarta.
- Maunah Binti, 2016. *Sosial Pendidikan*, Media Akademi.
- Purba Tioner, 2021. *Pupuk dan Teknologi Pemupukan*, Yayasan Kita Menulis.
- Rachman Benny, 2009. *Kebijakan Subsidi Pupuk, Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen, dan Regulasi*, Bogor.
- Rachman Benny, 2012. *Tinjauan Kritis, Perspektif Sistem Subsidi Pupuk, dan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Bogor.
- Rosyadi Faiqur, 2021. *Evektifitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Petani Padi*, Universitas Yudharta.
- Siagian Valentine, 2020. *Ekonomi & Bisnis Indonesia*, Yayasan Kita Menulis.
- Simanungkalit R.D.M, 2006. *Pupuk Organik dan Pupuk Hayati Organik Fertilizer And Biofertilizer*, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Badan Penelitian dan Perkembangan Pertanian Bogor.
- Sugiman, 2018. *Pemerintah Desa*, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Vol. 7. 2018.
- Sugiyono Prof. Dr, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Ekspoloratif, Enterpretatif, Interaktif, dan Konstruktif*, Alfabeta Bandung.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENJAMN KETERSEDIAAN PUPUK

Kelurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul,DIY.

A. Pertanyaan Untuk Lurah, Dukuh dan Ketua Gapoktan

1. Bagaimana tindakan pemerintah desa dalam melihat kondisi pertanian saat ini?
2. Bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam menyediakan subsidi pupuk untuk petani?
3. Bagaimana tindakan pemerintah desa dalam mendukung pencapaian sasaran produksi pertanian agar terus meningkat?
4. Bagaimana kerjasama dengan dinas pertanian untuk membantu petani dalam program pupuk subsidi?
5. Apa saja bantuan fasilitasi yang diberikan untuk petani?
6. Pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam memegang peranan di desa, apa yang akan dilakukan demi mencegah terjadinya kekurangan pupuk?
7. Bagaimana dengan kebijakan pemberian pupuk subsidi sudah bisa menutupi kebutuhan pupuk yang diminta para petani?
8. Apa saja permasalahan, keperluan, dan harapan yang disampaikan petani?
9. Melalui musyawarah apakah pihak pemerintah desa dapat berjumpa dengan para petani untuk mengenal aspirasi, kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi?
10. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani?
11. Bagaimana kerjasama dengan Dinas untuk membantu petani dalam pemberian subsidi harga pupuk?

B. Pertanyaan Untuk Petani

1. Pemerintah telah banyak mengalokasikan anggaran untuk penyediaan pupuk bersubsidi, apakah menurut saudara/saudari sudah sesuai dengan kebutuhan petani?
2. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa dalam mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian?
3. Apakah dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi pupuk sangat membantu untuk meningkatkan pendapatan saudara/saudari?
4. Menurut saudara/saudari apakah pemerintah desa dalam penyaluran pupuk subsidi sudah tepat sasaran?
5. Apakah pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi untuk mendorong penggunaan pupuk yang efisien?
6. Menurut saudara/saudari, apakah pemerintah desa banyak paham atau respon dalam penguatan para petani didesa ini khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk? Berikan contoh yang kongkritnya semacam apa?

7. Sepanjang ini apakah pemerintah desa mendengarkan harapan dan menjawab kebutuhan dan persoalan dari petani?
8. Apakah program atau aktivitas yang dilakukan pemerintah desa sangat membantu dan berhasil?
9. Apakah pemerintah desa memberikan bantuan pupuk subsidi?
10. Apakah pemerintah desa dalam penyaluran pupuk subsidi memakai sistem kartu?
11. Apakah yang dilakukan pemerintah desa dalam menangani harga pupuk bersubsidi dan non subsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi yang masih belum tepat sasaran?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Suwardi
Sebagai Kepala Desa. Pada 19 Januari 2023



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Edi Saraya
Selaku Sekretaris Desa, Pada 18 Januari 2023.



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Eka Indriyatna
Selaku Dukuh, Pada 19 Januari 2023.



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Karsimin
Selaku Dukuh, Pada 18 Januari 2023.



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Saede
Sebagai Petani, Pada 19 Januari 2023.



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Ngatelan
Selaku Petani, Pada 19 Januari 2023



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Daryono
Selaku Petani, Pada 19 Januari 2023.



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Patriman
Selaku Petani, Pada 18 Januari 2023



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Jumiran
Selaku Petani, Pada 18 Januari 2023



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Suharno
Selaku Ketua Gapoktan, Pada 18 Januari 2023.

SURAT KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
 STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225 .

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ORIKSAN LANGGU MAT
 Nomor Mahasiswa : 18520067
 Judul : INTERAKSI PEMERINTAH DESA DENGAN PETANI DESA TILENG, KECAMATAN GIRISUBO, KABUPATEN BUNUNGKIDUL, DIY
 Dosen Pembimbing : UTAMI SULISTIYANA, S.P., M.P.
 Mulai Bimbingan : 26-10-2022

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
26-10-2022	Konsultasi Penyusunan proposal skripsi	<i>ls</i>
1-11-2022	Konsultasi LB M, Revisi judul sementara.	<i>ls</i>
✓ 15-12-2022	Aee Proposal	<i>ls</i>
8-2-2023	Konsultasi Bab II	<i>ls</i>



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

Nomor : 087/PEM/J/X/2022

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Utami Sulistiana, S.P.,M.P.

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Orikson L.M.
No. Mahasiswa : 18520067
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi : 7 Oktober 2022
Judul Proposal : Interaksi Pemerintah Desa Dengan Petani Desa Tileng,
Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DIY

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Catatan : Diarahkan ke Governance.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022

Ketua Program Studi



[Signature]
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

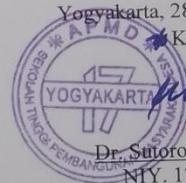
SURAT TUGAS
Nomor : 491/I/T/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Orikson Langgu May
Nomor Mahasiswa : 18520067
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Y
b. Sasaran : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY.
c. Waktu : 28 Desember 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 28 Desember 2022



Ketua
Dr. Sutoro Eko Yunanto
NID. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B
• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 820/I/U/2022
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 28 Desember 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

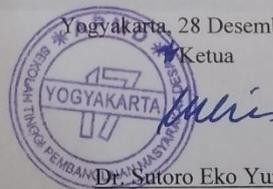
Nama : Orikson Langgu May
No Mhs : 18520067
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjamin Ketersediaan Pupuk di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY.
Tempat : Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Y
Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P.,M.P

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Desember 2022

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190